

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana digariskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran.

Setiap Laporan Kinerja (LKJ) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap SKPD dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai wujud konkrit dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Sungai Penuh No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, maka atas dasar itu laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai laporan kemajuan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk LKJ tahun 2020.

### **1.2. Isu Strategis**

Dalam pembangunan daerah Kota Sungai Penuh selama ini memiliki berbagai permasalahan yang cukup beragam baik permasalahan series (terus mengiringi) maupun permasalahan baru yang muncul berdasarkan kondisi global. Permasalahan tersebut akan membentuk suatu rumusan-rumusan yang jika diintegrasikan dengan kajian dan analisis isu-isu strategis pembangunan akan memberikan sebuah antisipasi dan jalan keluar permasalahan selama ini.

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting dan mendasar, mendesak berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) Tahun kedepan. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga kerja adalah :

1. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Penanaman Modal serta Ketenagakerjaan
2. Meningkatnya daya saing kota untuk mendukung iklim investasi
3. Meningkatnya kompetensi dan kemandirian tenaga kerja Kota Sungai Penuh

### **1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

#### **1.3.1. Kedudukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan, Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.3.2. Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

Dalam menunjang pencapaian visi Kota Sungai Penuh “ ***Mewujudkan Kota Sungai Penuh cerdas***”, guna tercapainya visi tersebut maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja memiliki prioritas kegiatan :

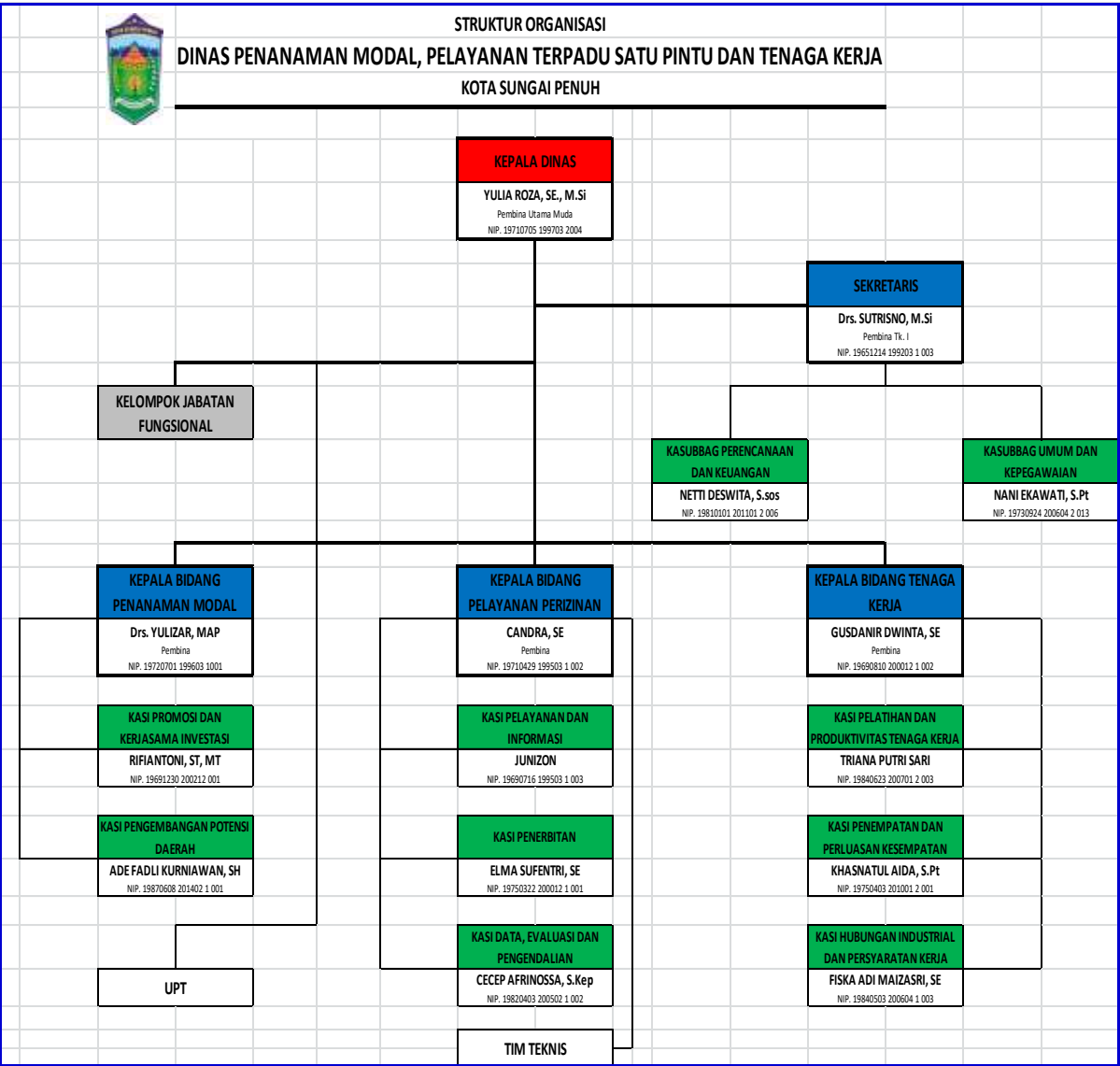
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3. Pembinaan Bimbingan Teknis
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
5. Pelaksanaan administrasi dinas
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **1.3.3. Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Bidang ketenagakerjaan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

1.3.4. Struktur Organisasi

Untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kabid Penanaman Modal, Kabid Tenaga Kerja, Kabid Pelayanan Perizinan, Kasi Promosi dan Kerjasama Investasi, Kasi Pengembangan Potensi Daerah, Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Kasi Informasi dan Pelayanan, Kasi Penerbitan, serta Kasi Data, Evaluasi, Pengendalian dan Kelompok Jabatan Fungsional.



#### **1.4. Dasar Hukum Penyusunan LKJ**

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Perencanaan strategis adalah langkah awal yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang diselaraskan dengan visidan misinya, dengan mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, sertapeluang yang membentang di depan.

Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh sebagai salah satu SKPD yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Sungai Penuh, serta secaraadministratif melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun LKJ tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 dengansusunannya dirumuskan dalam perencanaan jangka pendek dengan gambaran visi, misi,tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja yangditerjemahkan kedalam bentuk strategi dan rencana yang terarah, efektif danberkesnambungan berdasarkan skala prioritas atas dasar pagu anggaran yang disetujuioleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif dalam sebuah dokumen APBD tahun 2020.

Sebelum mengemukakan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh perlu diawali dengan memahami RenstraKota Sungai Penuh tahun 2016-2021, yaitu :

1. Melakukan analisis pertumbuhan penduduk, ekonomi dan proyeksi pendapatandaerah
2. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan pokok pembangunan denganmenggunakan SWOT analysis
3. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi
4. Mengidentifikasikan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan
5. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.

Dengan Renstra Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh berkewajiban untuk menata dengan baik tentang arus informasi dan proseskomunikasi agar mengalir dengan lancar, jangan sampai ada yang tersumbat, baikinformasi dari pemerintah daerah ke masyarakat ataupun dari masyarakat kepadapemerintah daerah. Dengan informasi dan komunikasi yang tertata dengan baik

akan mampu menyuburkan tata kehidupan yang harmonis, seimbang, demokratis dan padagilirannya akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat sebagai prasyarat suksesnya pembangunan.

## **2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

### **2.2.1 Visi**

Visi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 adalah ***“Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan Peningkatan Investasi serta Kompetensi Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh”***

### **2.2.2. Misi :**

Sesuai dengan visi tersebut mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung dengan kualitas Sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
2. Mewujudkan iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan meningkatkan peluang investasi.
3. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja

### **2.2.3. Tujuan :**

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- b. Meningkatkan Pondasi Perekonomian yang Berbasis IPTEKKIN
- c. Meningkatkan Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat yang Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beretos kerja tinggi

### **2.2.4. Sasaran :**

- a. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik
- b. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintah yang Akuntabel
- c. Terwujudnya Layanan Perekonomian Daerah yang Semakin Kuat
- d. Meningkatnya Kompetensi dan Kemandirian Tenaga Kerja

## **2.3. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan adalah Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam pentahapan strategi 5 tahun kedepan ditunjukkan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Layanan jaringan komunikasi data untuk peningkatan kecepatan dan kecuratan dalam pelayanan
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
3. Peningkatan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan daerah
4. Pelatihan ketrampilan kerja dan sertifikasi tenaga kerja baik skil maupun kemampuan manajemen
5. Peningkatan Jaringan pencari kerja (angkatan kerja)
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanaman modal
7. Meningkatkan promosi dan kepastian perlindungan usaha melalui harmonisasi perizinan

Strategis adalah rencana/metode yang ditempuh/dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka Strategis dan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik berbasis Teknologi dan Informasi, memenuhi SPM untuk mendukung pelayanan Smart City dalam tata pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Transparansi serta Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan Kualitas, Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Peningkatan Penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan Iklim Investasi.

#### **2.4. Prioritas Kegiatan**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang

berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh. Berikut ini digambarkan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
5. Program Pelayanan Perizinan

## **2.5. Faktor Penentu Keberhasilan**

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan bagi masyarakat secara baik, serta mewujudkan kepastian hukum
2. Meningkatkan pelayanan yang efisien, baik waktu maupun biaya serta iklim investasi dan pengembangan usaha.
3. Meningkatkan administrasi serta informasi pelayanan perizinan secara luas, transparan dan akuntabel
4. Meningkatkan investasi, pengawasan, pengendalian perizinan bagi masyarakat



**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Perpres RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh yang diberikan amanah wajib menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini diharapkan memberikan gambaran umum tentang tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan, baik dalam hal keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020 beserta Indikatornya.

**3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Nilai Evaluasi Sakip DPMPTSP TK	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat	B+	B+

Analisis :

1. Program Pelayanan Perizinan pada tahun 2020 mencapai target 100% yaitu memperoleh nilai 89,51 dengan mutu pelayanan B
2. Di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh kita telah memaksimalkan kinerja dari keseluruhan staf yang ada. Namun, disadari kami tetap kekurangan staf/sumber daya dikarenakan besarnya target kinerja dan tantangan dalam peningkatan mutu pelayanan di tahun mendatang
3. Dalam kegiatan Pelayanan Perizinan ini, dikarenakan belum adanya bendahara penerima dan tim teknis yang berkantor di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja serta masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten menjadi kendala dalam mencapai target kinerja yang lebih tinggi di tahun mendatang, selain itu sarana gedung kantor yang belum memenuhi standar pelayanan publik, perlu menjadi perhatian pejabat lainnya untuk yang akan datang.

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Nilai Investor Berinvestasi di Kota Sungai Penuh	Nilai Investasi Daerah	Rp.44.486.000.000	Rp.109.999.150.600

Analisis :

1. Di tahun 2020 realisasi capaian target mencapai 100 %
2. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang penanaman modal di tahun 2020
3. Karena tingginya antusias masyarakat pelaku ekonomi untuk memahami masalah Investasi yang menjadi faktor penyebab keberhasilan kinerja
4. Perlunya sumber daya untuk memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	6,38 %	4,34%
		PresentaseTingkat Kesempatan Kerja	29,72%	100%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,84 %	63,75%
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,39%	29,72%

Analisi :

1. Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2075 orang, pencari kerja yang ditempatkan yaitu 64orangdan magang ke jepang 4orang.
2. Pengembangan pembangunan pusat informasi telah dilaksanakan melalui informasi lowongan kerja serta melaksanakan himbauan melalui media radio, leaflet dan brosur ketenagakerjaan.

3. Dalam mengidentifikasi realisasi capaian kinerja terdapat kendala yaitu tidak adanya data yang terhimpun di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja mau pun di BPS Kota Sungai Penuh.

### 3.2. Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Nilai Evaluasi Sakip DPMPTSPTK	A	A
2	Meningkatnya Nilai Investor Berinvestasi di Kota Sungai Penuh	Nilai Investasi Daerah	Rp.44.486.000.000	Rp.109.999.150.600
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat	B+	B+
4	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	6,38%	4,34%
		Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	93,32%	100%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,84%	63,75%
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	29,72%	29,72%

<b><u>Program</u></b>	<b><u>Anggaran</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b><u>Anggaran</u></b>
1. Program peningkatan kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	<b>Rp. 358.632.904,-</b>	<b>Rp. 334.190.339,-</b>	
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.....	<b>Rp. 331.617.020,-</b>	<b>Rp. 308.519.096,-</b>	
3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.....	<b>Rp. 323.554.100,-</b>	<b>Rp. 293.010.125,-</b>	
4. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi .....	<b>Rp.177.245.900,-</b>	<b>Rp. 170.141.350,-</b>	
5. Program Pelayanan Perizinan.....	<b>Rp. 389.350.000,-</b>	<b>Rp.362.483.598,-</b>	

**LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN  
BELANJA LANGSUNG KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA / SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SUNGAI PENUH

KEADAAN SAMPAI BULAN : DESEMBER

NO	PROGRAM/JENIS KEGIATAN	Jumlah  Output	Jumlah  APBD  Belanja Langsung  (Rp)	PENGEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran  (Rp)	Sumber  Anggaran	Permasalahan	Solusi Penyelesaian Masalah
				REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK						
				Rupiah	Kinerja (%)	Kinerja (%)	Bobot Kegiatan	Kontribusi Kinerja (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
1,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	Rp 40.200.000,00	Rp 28.813.835	71,68	100,00	0,04	3,80	Rp 11.386.165,00	APBD II		
1,2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 orang	Rp 53.385.000,00	Rp 53.385.000	100,00	100,00	0,05	5,05	Rp -	APBD II		
1,3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 orang	Rp 7.878.000,00	Rp 7.628.000	96,83	100,00	0,01	0,75	Rp 250.000,00	APBD II		
1,4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 macam	Rp 4.909.900,00	Rp 4.581.300	93,31	100,00	0,00	0,46	Rp 328.600,00	APBD II		
1,5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 macam	Rp 8.310.000,00	Rp 8.310.000	100,00	100,00	0,01	0,79	Rp -	APBD II		
1,6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	Rp 1.385.000,00	Rp 1.385.000	100,00	100,00	0,00	0,13	Rp -	APBD II		
1,7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp -	APBD II		
1,8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	Rp 2.000.000,00	Rp 1.800.000	90,00	100,00	0,00	0,19	Rp 200.000,00	APBD II		
1,9	Penyediaan Makanan Minuman	150 om	Rp 3.430.000,00	Rp 3.070.000	89,50	100,00	0,00	0,32	Rp 360.000,00	APBD II		
1,10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	36 Kali	Rp 39.856.389,00	Rp 38.011.060	95,37	100,00	0,04	3,77	Rp 1.845.329,00	APBD II		
1,11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	9 orang	Rp 46.020.000,00	Rp 44.810.000	97,37	100,00	0,04	4,35	Rp 1.210.000,00	APBD II		
1,12	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	3 orang	Rp 625.001,00	Rp 625.000	100,00	100,00	0,00	0,06	Rp 1,00	APBD II		
1,13	Peningkatan dan pengembangan Disiplin Kepegawaian	4 Laporan	Rp 18.561.500,00	Rp 17.730.000	95,52	100,00	0,02	1,76	Rp 831.500,00	APBD II		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	Rp 12.500.000,00	Rp 12.455.000	99,64	100,00	0,01	1,18	Rp 45.000,00	APBD II		
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	3 Unit	Rp 27.950.000,00	Rp 23.098.159	82,64	100,00	0,03	2,64	Rp 4.851.841,00	APBD II		

2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	Rp 750.000,00	Rp 750.000	100,00	100,00	0,00	0,07	Rp -	APBD II		
2.4	Pengembangan Media Data / Informasi	1 Web	Rp 18.800.000,00	Rp 18.360.000	97,66	100,00	0,02	1,78	Rp 440.000,00	APBD II		
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	69 Stel	Rp 34.500.000,00	Rp 34.500.000	100,00	100,00	0,03	3,26	Rp -	APBD II		
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	7 kali	Rp 50.000.000,00	Rp 43.463.358	86,93	100,00	0,05	4,73	Rp 6.536.642,00	APBD II		
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Rp 20.945.500,00	Rp 20.585.500	98,28	100,00	0,02	1,98	Rp 360.000,00	APBD II		
5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	4 Dokumen	Rp 29.340.900,00	Rp 29.180.900	99,45	100,00	0,03	2,78	Rp 160.000,00	APBD II		
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
6.1	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	20.304.571	Rp 17.864.000	87,98	100,00	0,02	1,92	Rp 2.440.571,00	APBD II		
6.2	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	50 pencaker	Rp 312.066.440,00	Rp 3.550.000	1,14	95,00	0,30	28,04	Rp 308.516.440,00	APBD II		
7	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI											
7.2	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	1 kali	Rp 16.422.000,00	Rp 14.400.000	87,69	90,00	0,02	1,40	Rp 2.022.000,00	APBD II		
7.3	Promosi Penanaman Modal	3 kali	Rp 15.517.450,00	Rp 7.389.500	47,62	90,00	0,01	1,32	Rp 8.127.950,00	APBD II		
7.4	Evaluasi Pendampingan Penguatan Ekonomi Desa	14 Desa	Rp 22.784.750,00	Rp 6.972.500	30,60	90,00	0,02	1,94	Rp 15.812.250,00	APBD II		
8	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI											
8.1	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	1 Aplikasi	Rp 10.073.000,00	Rp 9.665.500	95,95	100,00	0,01	0,95	Rp 407.500,00	APBD II		
9	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA											
9.1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	12 laporan 24 prusahaan	Rp 28.246.189,00	Rp 27.426.189	97,10	100,00	0,03	2,67	Rp 820.000,00	APBD II		
9.2	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	20 Orang	Rp 16.682.456,00	Rp 15.872.456	95,14	100,00	0,02	1,58	Rp 810.000,00	APBD II		
9.3	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	30 orang	Rp 14.167.265,00	Rp 13.595.265	95,96	100,00	0,01	1,34	Rp 572.000,00	APBD II		

9,4	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Orang	Rp 15.301.351,00	Rp 14.283.351	93,35	100,00	0,01	1,45	Rp 1.018.000,00	APBD II		
9,5	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	40 Orang	Rp 11.075.465,00	Rp 10.525.465	95,03	100,00	0,01	1,05	Rp 550.000,00	APBD II		
10	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN											
10,1	Penatausahaan Penerbitan Perizinan	1300 Izin	Rp 44.985.000,00	Rp 41.267.700	91,74	100,00	0,04	4,26	Rp 3.717.300,00	APBD II		
10,2	Penatausahaan Informasi Pelayanan Perizinan	10 Bulan 8 Kecamatan	Rp 41.272.805,00	Rp 32.319.700	78,31	100,00	0,04	3,90	Rp 8.953.105,00	APBD II		
10,3	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	8 Kecamatan	Rp 34.044.215,00	Rp 33.731.000	99,08	100,00	0,03	3,22	Rp 313.215,00	APBD II		
10,4	Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan	2 Aplikasi	Rp 12.567.350,00	Rp 12.059.000	95,95	100,00	0,01	1,19	Rp 508.350,00	APBD II		
10,5	Penyusunan Kebijakan Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	3 dokumen	Rp 20.304.571,00	Rp 17.864.571	87,98	100,00	0,02	1,92	Rp 2.440.000,00	APBD II		
JUMLAH TOTAL			Rp 1.057.162.068,00	Rp 671.328.309	63,5		0,97	98,01	Rp 385.833.759			

Tabel Rencana Program RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh tahun 2020

No.	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2020	SKPD
1	Program peningkatan Pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan penunjang investasi	A	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp. 58,377.000.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
		Presentase PMA/PMDN di Kota Sungai Penuh yang taat aturan	97.50%	
3	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investai	Jumlah Investor (PMDN/PMN)	1.191	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
		Presentase Kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	40 %	
4	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi	3945 orang	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
		Terbangunnya Balai Latihan Kerja	1 unit	
		Data Base dan Profil Tenaga Kerja	Ada	
5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,84 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
		Presentase pencari kerja yang di tempatkan	29,72 %	
		Tingkat pengangguran terbuka	6,38 %	
		Terbangunnya Pusat Informasi Tenaga Kerja dan Perjalanan Ketenagakerjaan	100,00 %	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan pada bab sebelumnya dapat kami sampaikan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti sekalipun dirasakan belum optimal.

Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, dan adanya dukungan dari unsur pimpinan maupun staf pelaksana, ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai.

Adapun kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu keterbatasan kuantitas maupun kualitas personal, sarana dan prasarana kantor dan pembiayaan yang belum mampu mengakomodir tuntutan volume kegiatan yang semakin meningkat.

Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang, Terima Kasih.

Sungai penuh, 01 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA**

  
**YULIA ROZA, SE.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710705 199703 2 004

---

